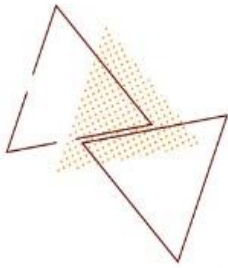


LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN RISIKO

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Denpasar



2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH	3
2.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV	3
2.1.1 Identifikasi Risiko.....	3
2.1.2 Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko	3
2.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV	3
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	4
3.1 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023	4
BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP.....	9
4.1 Pemantauan Keterjadian Risiko.....	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 Simpulan	10



ပီယီဂီၢ်ၤတူၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

တၢ်
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

LAPORAN TRIWULAN IV PENGELOLAAN RISIKO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian manajemen risiko yaitu suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya.

Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas- aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisiri atau bahkan dapat dihilangkan.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 3)

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar) dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko Badan Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar dalam mencapai tujuan.

1.4. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

2.1 RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV

2.1.1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 30 (tiga puluh) risiko, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

2.1.2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 30 risiko yang teridentifikasi telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 atau nihil risiko (0% dari 30 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2**.
- 2) Seluruh prioritas telah memiliki existing control (celah pengendalian yang sudah ada), sebanyak 0 risiko atau 0 % dari jumlah/populasi risiko prioritas;
- 3) Sebanyak 0 risiko prioritas telah memiliki existing control (celah pengendalian yang sudah ada) namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

2.2 REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 2 atau 100% kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.
- 3) Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Manajemen risiko fokus kepada rencana tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan pelaksanaan kegiatan yang kurang/tidak efektif untuk pencapaian tujuan dimaksud. Hambatan pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Realisasi Kegiatan Resiko	GAP Antara Rencana dan Realisasi	Hambatan
I Risiko Strategis OPD					
1	Keselarasan dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional belum Optimal	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
2	Pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan Kota Denpasar tidak sesuai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
3	Kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota belum optimal	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
4	Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan belum sesuai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
II Risiko Operasional OPD					
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak 	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Realisasi Kegiatan Resiko	GAP Antara Rencana dan Realisasi	Hambatan
		kepada pelaksana terkait	melakukan pelanggaran		
2	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
3	Data dalam penyusunan dokumen tidak tersedia tepat waktu	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
4	Kurang optimalnya identifikasi isu-isu strategis dan permasalahan	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
5	Pertanggung jawaban tidak tepat waktu	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
6	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah tidak tepat waktu	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment	1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Realisasi Kegiatan Resiko	GAP Antara Rencana dan Realisasi	Hambatan
		kepada pelaksana terkait	melakukan pelanggaran		
8	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
9	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop Memberikan punishment kepada pelaksana terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran 	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
10	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop Memberikan punishment kepada pelaksana terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran 	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
11	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop Memberikan punishment kepada pelaksana terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran 	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
12	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop Memberikan punishment kepada 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan 	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Realisasi Kegiatan Resiko	GAP Antara Rencana dan Realisasi	Hambatan
		pelaksana terkait	pelanggaran		
13	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidaksesuai dengan dokumen perencanaan kota	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
14	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
15	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
16	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
17	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidaksesuai dengan dokumen perencanaan kota	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
18	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Realisasi Kegiatan Resiko	GAP Antara Rencana dan Realisasi	Hambatan
19	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran 	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
20	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan 2. Tidak memberikan punishment karena tidak melakukan pelanggaran 	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
21	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidaksesuai dengan dokumen perencanaan kota	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan
22	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan seminar, bimtek dan workshop perencanaan	Tidak ada GAP	Tidak ada hambatan

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

4.1 Pemantauan Keterjadian Risiko

Pemantauan Keterjadian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada tahun 2023. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar telah melakukan analisis manajemen resiko dari setiap Program kegiatan yang ada. Berdasarkan hasil analisa manajemen resiko dari Program kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar terdapat 30 (tiga puluh) kegiatan yang beresiko moderat, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional, pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan kota Denpasar tidak sesuai, belum optimalnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan, dan belum sesuainya pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan. Adapun potensi resiko terkait dengan belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional, pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan kota Denpasar tidak sesuai, belum optimalnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan, dan belum sesuainya pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kompetensi SDM yang kurang memadai.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan dalam semua Program kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program kegiatan, sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, sehingga semua Program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dapat berjalan dengan lancar.

Denpasar, 04 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004

Lampiran 1 : Form 4

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Keselarasn dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional belum optimal	RSP.22.36.01.1	5	2	10
2	Pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan Kota Denpasar tidak sesuai	RSP.22.36.01.1	5	2	10
3	Kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota belum optimal	RSP.22.36.01.2	5	2	10
4	Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan belum sesuai	RSP.22.36.01.2	5	2	10
II	Risiko Strategis OPD				
1	Keselarasn dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional belum optimal	RSO.22.36.01.1	5	2	10
2	Pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan Kota Denpasar tidak sesuai	RSO.22.36.01.1	5	2	10
3	Kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota belum optimal	RSO.22.36.01.2	5	2	10
4	Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan belum sesuai	RSO.22.36.01.2	5	2	10
III	Risiko Operasional OPD				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.1	2	2	4
2	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.1	2	2	4
3	Data dalam penyusunan dokumen tidak tersedia tepat waktu	ROO.22.36.01.1.1	2	2	4
4	Kurang optimalnya identifikasi isu-isu strategis dan permasalahan	ROO.22.36.01.1.1	2	2	4
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.2	2	2	4
6	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.2	2	2	4
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.2	2	2	4
8	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.3	2	2	4
9	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.3	2	2	4
10	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan	ROO.22.36.01.1.3	2	2	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
11	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.3	2	2	4
12	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.4	2	2	4
13	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.4	2	2	4
14	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.4	2	2	4
15	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.2.4	2	2	4
16	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.5	2	2	4
17	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.5	2	2	4
18	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.5	2	2	4
19	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.2.6	2	2	4
20	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.6	2	2	4
21	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.6	2	2	4
22	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.6	2	2	4

Denpasar, 04 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004

Lampiran 2 : Form 5 Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Keselarasn dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional belum optimal	RSP.22.36.01.1	10	KA Bappeda	Penyediaan data yang belum cukup sesuai dengan kebutuhan penyusunan	Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal
2	Pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan Kota Denpasar tidak sesuai	RSP.22.36.01.1	10	KA Bappeda	Koordinasi yang belum maksimal	Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal
3	Kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota belum optimal	RSP.22.36.01.2	10	KA Bappeda	Koordinasi yang belum optimal	Kualitas perencanaan perangkat daerah kurang maksimal
4	Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan belum sesuai	RSP.22.36.01.2	10	KA Bappeda	Kapasitas SDM yang belum optimal	Kualitas perencanaan perangkat daerah kurang maksimal
II	Risiko Strategis OPD					
1	Keselarasn dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional belum optimal	RSO.22.36.01.1	10	KA Bappeda	Penyediaan data yang belum cukup sesuai dengan kebutuhan penyusunan	Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal
2	Pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan Kota Denpasar tidak sesuai	RSO.22.36.01.1	10	KA Bappeda	Koordinasi yang belum maksimal	Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal
3	Kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota belum optimal	RSO.22.36.01.2	10	KA Bappeda	Koordinasi yang belum optimal	Kualitas perencanaan perangkat daerah kurang maksimal
4	Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan belum sesuai	RSO.22.36.01.2	10	KA Bappeda	Kapasitas SDM yang belum optimal	Kualitas perencanaan perangkat daerah kurang maksimal
III	Risiko Operasional OPD					
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.1	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
2	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.1	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi disetiap bulannya oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
3	Data dalam penyusunan dokumen tidak tersedia tepat waktu	ROO.22.36.01.1.1	4	KA Bappeda	Data dari perangkat daerah dan stakeholder terlambat untuk dilengkapi	Penyusunan dokumen tidak tepat waktu sesuai dengan agenda perencanaan
4	Kurang optimalnya identifikasi isu-isu strategis dan permasalahan	ROO.22.36.01.1.1	4	KA Bappeda	Evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan hanya terbatas pada capaian serapan anggaran dan progres fisik. Tidak berdasarkan atas capaian kinerja.	Perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya tidak optimal
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.2	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
6	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.2	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi disetiap bulannya oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.2	4	KA Bappeda	Penyampaian data dari perangkat daerah terlambat	Keterlambatan penerimaan hak-hak oleh pejabat politik
8	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.3	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
9	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.3	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi disetiap bulannya oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
10	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan	ROO.22.36.01.1.3	4	KA Bappeda	Keterlambatan penyediaan e-data base yang tertuang dalam profil pembangunan daerah	Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah terlambat
11	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.3	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
12	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.4	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi disetiap bulannya oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
13	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.4	4	KA Bappeda	Frekuensi dan kualitas koordinasi yang tidak optimal	Kualitas dokumen perencanaan kota tidak optimal
14	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.4	4	KA Bappeda	Evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan hanya terbatas pada capaian serapan anggaran dan progres fisik. Tidak berdasarkan atas capaian kinerja.	Perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya tidak optimal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
15	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.2.4	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
16	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.5	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi disetiap bulannya oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
17	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.5	4	KA Bappeda	Frekuensi dan kualitas koordinasi yang tidak optimal	Kualitas dokumen perencanaan kota tidak optimal
18	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.5	4	KA Bappeda	Evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan hanya terbatas pada capaian serapan anggaran dan progres fisik. Tidak berdasarkan atas capaian kinerja.	Perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya tidak optimal
19	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.2.6	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
20	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.6	4	KA Bappeda	Dokumen pencairan dana terlambat dilengkapi disetiap bulannya oleh PPTK	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
21	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.6	4	KA Bappeda	Frekuensi dan kualitas koordinasi yang tidak optimal	Kualitas dokumen perencanaan kota tidak optimal
22	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.6	4	KA Bappeda	Evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan hanya terbatas pada capaian serapan anggaran dan progres fisik. Tidak berdasarkan atas capaian kinerja.	Perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya tidak optimal

Denpasar, 04 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Lampiran 3 : Form 7 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Keselarasn dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional belum optimal	RSP.22.36.01.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
2	Pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan Kota Denpasar tidak sesuai	RSP.22.36.01.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
3	Kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota belum optimal	RSP.22.36.01.2	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
4	Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan belum sesuai	RSP.22.36.01.2	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
II Risiko Strategis OPD							
1	Keselarasn dokumen perencanaan Kota Denpasar dengan dokumen Provinsi Bali dan Nasional belum optimal	RSO.22.36.01.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
2	Pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan Kota Denpasar tidak sesuai	RSO.22.36.01.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
3	Kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota belum optimal	RSO.22.36.01.2	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
4	Pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan belum sesuai	RSO.22.36.01.2	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
III Risiko Operasional OPD							
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
2	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 3. Memberikan punishment kepadapelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
3	Data dalam penyusunan dokumen tidak tersedia tepat waktu	ROO.22.36.01.1.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	4. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
4	Kurang optimalnya identifikasi isu-isu strategis dan permasalahan	ROO.22.36.01.1.1	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	5. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.2	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
6	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.2	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.2	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
8	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.3	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
9	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.1.3	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
10	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan	ROO.22.36.01.1.3	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
11	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.1.3	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
12	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.4	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
13	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.4	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
14	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.4	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
15	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.2.4	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
16	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.5	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
17	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.5	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
18	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.5	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
19	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.36.01.2.6	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
20	Penatausahaan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.22.36.01.2.6	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	1. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop 2. Memberikan punishment kepada pelaksana terkait	KA Bappeda	Triwulan IV
21	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota	ROO.22.36.01.2.6	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV
22	Kurang optimalnya identifikasi permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah	ROO.22.36.01.2.6	SOP penyusunan dokumen perencanaan Kota Denpasar	Tingkat kompetensi SDM kurang memadai	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	KA Bappeda	Triwulan IV

Denpasar, 04 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004

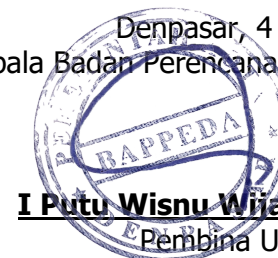
Lampiran 4 : Form 8 Rencana Realisasi Atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melalui Zoom Meeting	Penyelenggara Diklat	Bappeda Kota Denpasar	Triwulan II	Triwulan II	
2	Memberikan punishment kepada pelaksana terkait dengan pertanggungjawaban, penatausahaan, perencanaan, dan pemantauan	Melalui surat peringatan	KA Bappeda	Bappeda Kota Denpasar	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	

Denpasar, 4 Januari 2024
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671007 199703 1 004

Lampiran 5 : Form 9 Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian : 2023						
Tujuan Strategis : Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, diklat, seminar, dan workshop	Melakukan evaluasi terkait dengan kinerja SDM terkait	KA Bappeda Kota Denpasar	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	
2	Memberikan punishment kepada pelaksana terkait dengan pertanggungjawaban, penatausahaan, perencanaan, dan pemantauan	Frekuensi surat peringatan yang telah diberikan	KA Bappeda Kota Denpasar	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	

Denpasar, 4 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT

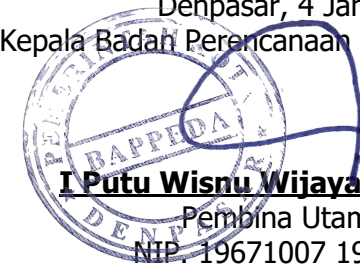
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Lampiran 6 : Form 10 Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Even*) dan Pelaksanaan RTP

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar									
Tahun Penilaian	: 2023									
Tujuan Strategis	: Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pilihan Pariwisata									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
II	Risiko Strategis OPD									
NIHIL										
III	Risiko Operasional OPD									
NIHIL										

Denpasar, 4 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004